

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Gambaran Umum Lokus Penelitian**

##### **4.1.1 Logo Binmas Polri**

**Gambar 4.1**  
**Logo Humas Polri**



Sumber : website [www.polri.go.id](http://www.polri.go.id)

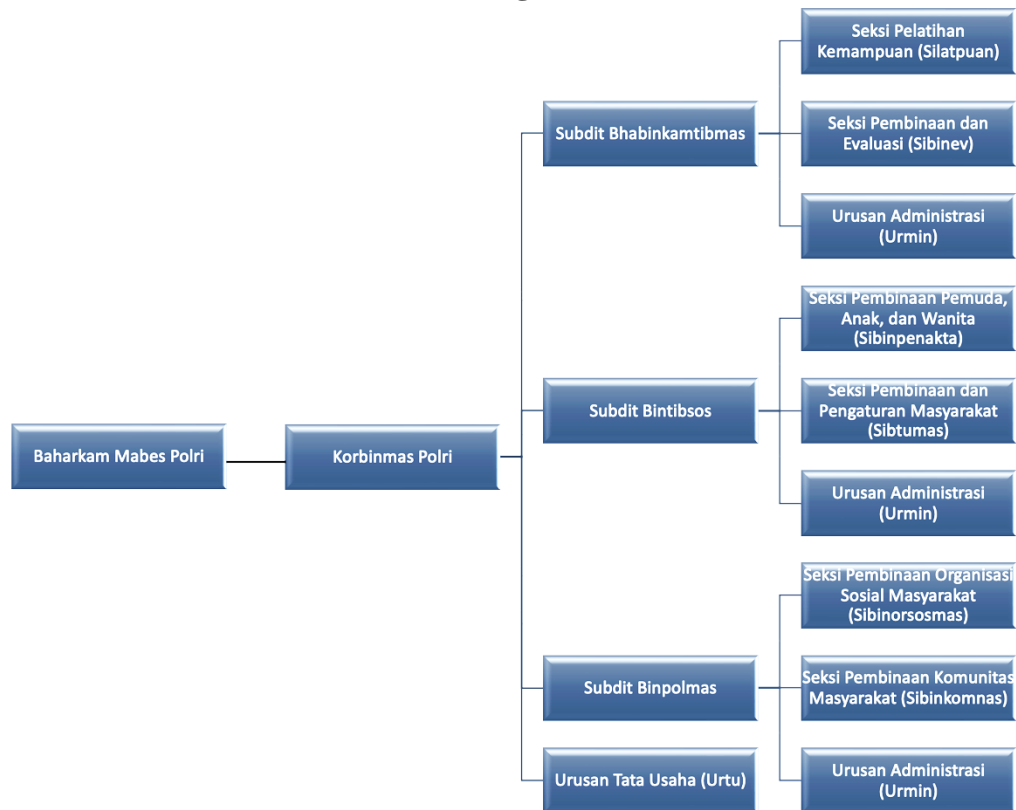
##### **1.1.2 Profil Binmas Polri**

Pengemban tugas “Binmas” bertugas menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas.

Fungsi Binmas adalah sebagai alat pengendali, penggerak dan pemberdaya masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga masyarakat.

### 1.1.3 Struktur Organisasi Binmas Polri

**Tabel 4.1**  
**Tabel Struktur Organisasi Binmas Polri**



### 1.1.4 Tugas Pokok Binmas Polri

Untuk melaksanakan fungsinya, Binmas Polri berperan

- Pengendali Masyarakat

Dalam pelaksanaan peran ini Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

- Pengarah dan penggerak masyarakat  
Dalam peran ini Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara/ pemerintah. Polri menggerakkan masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.
- Pemberdaya potensi masyarakat  
Dalam peran ini Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak azasi tiap individu. Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang ada dilapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan informan untuk mengumpulkan informasi atau data. Proses pengumpulan informasi atau data dilakukan dengan cara wawacarai secara mendalam para informan.

Informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam program yang diteliti atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam program community relations ini merupakan pihak yang menguasai program dalam penelitian ini. Hal tersebut agar informan pada saat diwawancarai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan program ini. Maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan key informan adalah Iptu Prisma Hanindita Inggit Permana, S.I.Kom sebagai Kanit Ro Mulmed, dan informan selanjutnya adalah Briпка Tadjiar Filma, S.H. sebagai anggota Bag Penmas Humas Mabes Polri. Sedangkan triangulasi sumber yaitu Yakob Maipauw sebagai masyarakat Papua.

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan wawancara, tatap muka dengan ketiga informan. Pada proses penelitian, key informan, informan dan triangulasi sumber diwawancarai dengan beberapa pertanyaan penelitian yang telah disusun dengan pokok-pokok dasar penelitian. Dengan berpedoman pada panduan pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur, yang kemudian dikembangkan untuk memperoleh informasi mendalam akan permasalahan tersebut.

Implementasi program *community relations* rencana yang baik tak akan berarti dan berdampak apapun terhadap organisasi bila tidak diimplementasikan dengan baik. Begitu juga halnya dengan program atau kegiatan *Public relations* yang berwujud program atau kegiatan *community relations*. Berdasarkan konteks manajemen strategis, begitu satu rencana strategis sudah disusun dan ditetapkan maka fokus berikutnya adalah mengimplementasikannya. Implementasi pada dasarnya adalah himpunan kegiatan dan pilihan yang diperlukan untuk menjalankan rencana. (Wheelen dan Hunger, 1995:221). Implementasi ini tidak lain merupakan proses menjabarkan strategi dan kebijakan ke dalam tindakan dengan mengembangkan program, anggaran dan prosedur.

Dengan begitu, kebijakan merupakan salah satu mata rantai dari langkah-langkah pengelolaan organisasi secara strategis yang bermula dari misi dan bermuara pada tindakan. Diterapkan pada program *community relations*, bagan tersebut menunjukkan bahwa misi organisasi merupakan landasan penting program *community relations* organisasi.

#### 4.2.1 Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan, informan 1, dan informan pembandingan maka peneliti memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan mengenai strategi *Community Relations* Polri guna membangun kepercayaan Publik dalam pendekatan keamanan di Papua, publik di sini adalah masyarakat. Dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan, diketahui bahwa Binmas Polri melakukan strategi *Community Relations* guna membangun kepercayaan Publik dalam pendekatan keamanan di Papua sesuai dengan operasionalisasi konsep yang mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Yosol Irianta dan DiPiazza & Eccles, 2002:3-6.

Maka dari hasil wawancara dan semua data yang diperoleh didapat empat bagian pokok diantaranya adalah (1) Pengembangan relasi (2) mutual benefit (3) komunitas sasaran (4) Sasaran jangka panjang (5) sikap transparan (6) akuntabilitas dan (7) Integritas Binmas Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam membangun kepercayaan publik. Berikut akan diinterpretasikan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

##### 1. **Pengembangan relasi dengan masyarakat dalam pendekatan keamanan di Papua**

Pengembangan relasi dari program Binmas Noken memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu instansi dalam melaksanakan program tersebut. Berikut penjelasan Key Informan, Prisma Hanindita Inggit Permana, S.I.Kom:

“ Yang dilakukan oleh Binmas Polri secara global ke masyarakat itu dengan cara pemberian informasi kepada masyarakat untuk meluruskan stigma negative atau isu

negative melalui media mainstream dan media online secara global di Binmas Polri, jadi dalam mengembangkan relasi dengan masyarakat divisi humas langsung mengimplementasikan. Yang nantinya itu menjadi hubungan masyarakat disini ada Biro Penmas misalnya dia yang memberikan informasi via media mainstream”

Hal tersebut didukung oleh kutipan informan yang menyatakan bahwa program yang dilaksanakan oleh Binmas Polri melakukan pengembangan relasi dengan masyarakat dikarenakan memang untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri, Bripka Tadjjar Filma, S.H. :

“ Jadi polri itu harus lebih dekat dengan masyarakatnya sendiri terutama mengenai KKB di Papua dimana mereka menebarkan jaringannya jadi tujuan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) ini agar masyarakat ikut dengan golongan dan jaringan mereka karena dengan bagaimanapun sesuai dengan undang-undang yang ada tidak ada organisasi lain yang harus berkembang di indonesia untuk mencoba memecah negara kesatuan rePublik indonesia. Yang pertama dilakukan adalah melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat secara humanis.

Yang kedua melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh adat dan kepala sukunya karena peran-peran mereka adalah sebagai pembimbing yang berpengaruh serta dipercaya oleh masyarakat akan kemampuannya. Tokoh-tokoh masyarakat ini mempunyai kewajiban untuk membantu dan mengarahkan masyarakat agar dapat bertindak dengan benar sesuai dengan lingkungan sekitar. ”

Disambung oleh triangulasi sumber Bapak Yakob Maipauw yang menyatakan bahwa memang program tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat. Berikut pernyataanya :

“Ya, Binmas Polri memiliki program Binmas Noken yang dilaksanakan di Papua dalam rangka memberikan mutual benefit kepada masyarakat dan mengembalikan tingkat kepercayaan public pasca insiden konflik di Papua”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa program dari Binmas Polri ini memang benar mengembangkan relasinya.

## **2. Cara Polri menjaga hubungan baik (mutual benefit) dengan masyarakat dalam pendekatan keamanan di Papua**

Berikut penjelasan Key Informan, Prisma Hanindita Inggit Permana, S.I.Kom:

“ Pada dasarnya Divisi Humas Polri tugas pokoknya adalah memberikan informasi, sama sebagai etalasnya Polri lah, nah kalo menjaga hubungan baik dengan masyarakat itu contohnya di jaman perkembangan teknologi sekarang melalui biro multimedia, khususnya anak-anak milenial generasi Z mungkin yang bertanya terkait apapun termasuk Papua, termasuk isu-isu Papua yang banyak hoax waktu itu ya ada komunikasi 2 arah nanti Ketika netizen nanya di kolom komentar ya salah satu contohnya dengan si admin-admin official Divisi Humas Polri memberikan jawaban yang sebenar-benarnya itu termasuk salah satu menjaga hubungan baik dengan masyarakat, intinya supaya masyarakat tidak mudah kemakan isu yang bisa mengakibatkan perpecahan salah satu contohnya seperti itu ”

Hal tersebut didukung oleh kutipan informan, berikut penjelasan informan, Tadjiar Filma, S.H.:

“Menurut saya kurangnya rasa masyarakat terhadap polisi di Indonesia adalah salah satu masalah yang masih dihadapi Polri Ketika melaksanakan tugas dan Ketika bekerjasama dengan masyarakat. Maka, kita harus salah satu caranya dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, yaitu yang pertama selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat salah satunya dengan memberikan sembako misalnya, seperti memenuhi kebutuhan masyarakat karena Polri harus memberikan perhatian lebih ke masyarakat agar hubungan baik yang sudah dibangun selama

ini akan selalu terjaga hubungannya. Ketika kita mengatakan, kita mempercayai seseorang dan bahwa seseorang itu dapat dipercaya, berarti secara tersirat kita mengatakan bahwa kemungkinan ia melakukan aksi yang menguntungkan atau setidaknya tidak merugikan kita cukup tinggi, sehingga kita bersedia bekerjasama dengan. Kalau masyarakat mempercayai anggota polri, berarti masyarakat mengatakan bahwa kemungkinan anggota polri itu melakukan perbuatan yang memberikan manfaat atau setidaknya tidak merugikan masyarakat cukup tinggi. Karenanya masyarakat bersedia menjalin hubungan baik dan Kerjasama dengan anggota polri.”

Disambung oleh triangulasi sumber Bapak Yakob Maipauw yang menyatakan sebagai berikut penjelasannya :

“Sering, hampir setiap program saya ikuti karena berkaitan langsung dengan masyarakat yang mana program tersebut dilaksanakan dalam bidang Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Pengembangan Pariwisata serta pemberdayaan ibu rumah tangga”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa butuh pengembangan relasi untuk mendukung adanya kegiatan Binmas Polri, dan Polri sudah melaksanakan pengembangan relasi demi mutual benefit antara polri dan masyarakat.

### **3. Polri dalam menjaga melakukan pendekatan komunitas sasaran seperti individu, tokoh adat, dan masyarakat**

Berikut penjelasan Key Informan, Prisma Hanindita Inggit Permana, S.I.Kom:

“ Kalo masalah komunitas di Biro multimedia ada namanya program perisai siber nusantara jadi kayak kegiatan kumpul bareng komunitas jadi itu termasuk salah satu cara dalam melakukan pendekatan secara humanis

Biro Penas juga melakukan program sosialisasi diskusi ke seluruh polda yang ada di Indonesia bulan lalu juga kita



punya kegiatan salah satu contoh pendekatan ke tokoh agama masyarakat dan tokoh adat setempat.

Kalo pendekatan dengan individu biasanya kita mengundang salah satu dari mereka untuk datang ke acara podcast yang kita buat memberikan ruang menampung aspirasi mereka, selain podcast juga ada acara talkshow secara live pendekatan secara langsung melalui media.

Contoh lainnya adanya unjuk rasa terkait yang menolah gubernur papua di tahan oleh KPK dari situ peran Binmas dan humas sudah melakukan upaya pencegahan preventif kepada masyarakat binmas mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak membuat kegaduhan humas dan binmas memberikan”

Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh Informan. Berikut penjelasan Informan, Tadjiar Filma, S.H. :

“Terjun langsung ke lapangan akan tetapi dicek dulu mengenai apakah masyarakat termasuk golongan dari organisasi yang terlarang atau bukan seperti contohnya KKB. Dilakukan secara negosiasi untuk pengamanan internal anggota polri harus di perhatikan mengenai orang ini termasuk dalam bahaya atau baru ingin bergabung.”

Disambung oleh triangulasi sumber Bapak Yakob Maipauw berikut penjelasannya :

“Ya, Polri memiliki program satu tahun sekali”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa Binmas Polri menjaga keberadaan komunitas yang sudah ada dengan baik dengan masyarakat.

#### **4. Program Binmas Noken dalam membentuk hubungan jangka Panjang dengan masyarakat**

Berikut penjelasan Key Informan, Prisma Hanindita Inggit Permana, S.I.Kom:

“Dengan membuat program berkualitas salah satunya binmas noken, dimana peran divisi humas polri beriringan dari segi media sosial karena kita sama-sama mempunyai fungsi yang sama untuk mengedukasi ke masyarakat. Saya juga pernah mempunyai program dulu di daerah Timika ada kegiatan kita binmas noken Bersama dengan divisi humas polri nama programnya polisi piajar, yaitu program kerja dimana mengajari anak-anak dan masyarakat untuk belajar membaca, bernyanyi, memberikan edukasi terkait lagu-lagu nasional dan memberikan gambaran bagaimana cara ternaik babi yang nantinya menjadikan babi tsb menjadi kualitas yang unggul guna untuk memperbaiki ekonomi masyarakat setempat. Tokoh-tokoh adat juga selalu berharap kepada kita untuk datang kembali mengedukasi mereka. Di distrik pomkinarama dimana notabennya mereka adalah penternak babi kita memberikan mereka anakan babi ke mereka terus itu merupakan suatu upaya pendekatan jangka Panjang nantinya kita memberikan bibit babinya dari peran divisi humas polri mendampingi binmas untuk mengambil data dari kegiatan tsb dan mengemas dalam bentuk informasi kemudian kita sebarkan ke media jadi kita semua ini adalah hubungan mutualisme, dan itu akan berlanjut terus menerus.”

Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh Informan. Berikut penjelasan Informan, Tadjiar Filma, S.H.

“Ya untuk selalu memberikan pembinaan kepada masyarakat apa itu isi dasar undang-undang, yang menyebutkan tidak boleh ada lagi organisasi-organisasi yang tujuan untuk memecah belah Indonesia terkait tentang bahayanya organisasi tsb”

Disambung oleh triangulasi sumber Bapak Yakob Maipauw berikut penjelasannya :

“Ya, saya masih memiliki hubungan yang sangat baik dengan Polri dikarenakan adanya program tersebut”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa program binmas noken harus mempunyai hubungan yang berjangka Panjang dengan masyarakat

dengan begitu maka masyarakat akan selalu memberikan kepercayaannya kepada Polri.

**5. Program Binmas Noken Informasi yang disampaikan secara transparan antara Binmas Polri dengan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik.**

Dalam setiap program sudah pasti ada informasi yang disampaikan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Informasi tersebut disampaikan secara transparan. Berikut penjelasan Key Informan, Prisma Hanindita Inggit Permana, S.I.Kom:

“Menurut saya sudah sangat transparan, jadi gini contohnya ya, kita sudah menyampaikan apa adanya kepada masyarakat tanpa ada yang di tutup-tutupi, binmas noken pernah ke desa-desa ibaratnya daerahnya terpencil dengan keadaan yang mungkin memprihatinkan, tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, masyarakatnya yang kurang adanya Pendidikan, ada juga yang tidak tau lagu Indonesia raya, segala macamnya, transparansi kita disitu kita tunjukkan bahwa polisi itu hadir untuk masyarakat disana memberikan wawasan kebangsaan dan memberikan bantuan seperti buku tulis, itu transparan apa yang kita lihat disana, kita sampaikan secara real di media. Saya pernah melakukan evakuasi anggota brimob itu informasi di papua, beliau yang brimob ini, almarhum lagi melaksanakan keamanan untuk pemerian bantuan ke masyarakat tiba-tiba KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang ngga suka ini ya nembak gitu aja kea rah pasukan yang sedang mengamankan jadinya kan terlihat gitu disini polri hadir peduli sama temen-temen di papua jadi malah KKBnya yang ngga bisa peduli yaitu transparan apa yang KKB lakukan kita sampaikan juga ke media, KKB bakar gereja juga kita sampaikan sesuai dengan fakta yang ada biar semuanya terbuka jelas, jadi bukan hanya dari sudut pandang polri aja kalo memang di Papua KKB melakukan aksi yang melanggar hukum ya kita sampaikan”

Hal tersebut didukung oleh kutipan informan dalam setiap program sudah pasti ada informasi yang disampaikan yang sudah sesuai

dengan ketentuan yang ada. Informasi tersebut disampaikan secara transparan. Berikut penjelasan informan, Tadjiar Filma, S.H.:

“sudah, karena anggota polri tidak sembarang memberikan arahan kepada masyarakat terkait bahayanya organisasi KKB (Kelompok Kriminal bersenjata) ini, dan dilakukan dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang ada. Transparansi sangat penting dalam penyelenggaraan organisasi, karena merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut dan Polri menurut saya sudah menjalankan hal tersebut.”

Disambung oleh triangulasi sumber Bapak Yakob Maipauw yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan Binmas Polri sudah disampaikan secara transparan. Berikut penjelasannya :

“Ya, sudah sangat transparan dikarenakan Polri memberikan informasi apa adanya terhadap media yang ada mengenai situasi yang terjadi disini”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa program kerja yang dilakukan oleh Binmas Polri sudah disampaikan secara transparan dan apa adanya baik kepada masyarakat maupun kepada media.

**6. Akuntabilitas Binmas Polri dengan masyarakat yang berkomitmen untuk bekerjasama dengan baik dalam membangun kepercayaan publik.**

Dalam setiap program, tentunya membutuhkan komitmen untuk bekerjasama dengan baik agar program tersebut berjalan dengan baik. Informasi tersebut disampaikan secara transparan. Berikut penjelasan Key Informan, Prisma Hanindita Inggit Permana, S.I.Kom:

“Iya ada, komitmennya ada. Jadi kita juga memiliki tugas untuk menjalin kemitraan dengan baik itu dengan masyarakat, Lembaga, institusi, atau Lembaga Pendidikan dalam dan luar negeri bahkan, jadi menjalin kemitraan dan membuat MOU atau nota kesepakatan”

Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh Informan. Berikut penjelasan Informan, Tadjiar Filma, S.H. :

“Iya sudah, karena Polri dituntut untuk menjaga komitmen yang baik dengan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab polri untuk mempunyai komitmen menjalin Kerjasama yang baik.”

Disambung oleh triangulasi sumber Bapak Yakob Maipauw yang menyatakan bahwa Binmas Polri sudah berkomitmen untuk bekerjasama dengan masyarakat guna membangun kepercayaan publik dalam pendekatan keamanan di Papua. Berikut penjelasannya :

“Ya, masyarakat disini sudah berkomitmen dengan Polri untuk membangun kepercayaan public dalam pendekatan keamanan di Papua”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa Binmas Polri dengan masyarakat sudah berkomitmen untuk bekerjasama dengan baik dalam membangun kepercayaan publik.

#### **7. Integritas Binmas Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam membangun kepercayaan Publik.**

Dalam setiap program, tentunya sesuai dengan integritas untuk bekerjasama dengan baik dalam membangun kepercayaan publik. Informasi tersebut disampaikan secara transparan. Berikut penjelasan Key Informan, Prisma Hanindita Inggit Permana, S.I.Kom:

“Ya sudah, sudah kami lakukan dari semua biro kita sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kalo di polda metro ini ada 3 subdit humas yaitu PID tugasnya meliput dan mengkopulir data informasi, subdit penmas itu yang berhubungan dengan masyarakat atau media dan wartawan, multimedia itu sebagai yang mengeluarkan ide-ide kreatif di seluruh media sosial seperti Instagram, facebook, twitter, tiktok dan youtube, semua media sosial kita memberikan penerangan kepada masyarakat melalui platform tsb, dan sesuai dengan tugasnya masing- masing sudah menjalankan dengan tanggung jawab yang Amanah.”

Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh Informan. Berikut penjelasan Informan, Tadjiar Filma, S.H.

“Ya sudah, semua fungsi polri sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk membangun kepercayaan publik dalam pendekatan di Papua.” Dan

“Pastinya sudah, karena setiap anggota polri tidak sembarang memberikan informasi kepada masyarakat terkait konflik yang ada di indonesia karena polri sendiri tidak mau masyarakatnya terbelah dan tidak mau terjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan apalagi dengan negara Indonesia. Termasuk peran penting anggota polri dalam menjaga keutuhan masyarakat yang berada di NKRI.”

Disambung oleh triangulasi sumber Bapak Yakob Maipauw yang menyatakan bahwa Binmas Polri sudah berintegritasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berikut penjelasannya :

“Karena dari Polri sudah transparan, tentu juga sudah menyampaikan informasi sesuai dengan integritas yang ada”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa Binmas Polri dalam bertugas sudah berintegritasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

### 4.2.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Proses pembahasan hasil penelitian adalah untuk mencari hubungan antara teori atau konsep yang ada dengan hasil penelitian yang diperoleh. Dengan adanya analisa data ini, maka akan diuraikan hasil penelitian yang diperoleh dengan wawancara sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai *Community Relations* yang dilakukan oleh Binmas Polri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Binmas Polri memiliki sebuah program *Community Relations* yang diperuntukkan bagi komunitas masyarakat di Papua khususnya di wilayah Timika guna membangun kepercayaan publik. Salah satu program yang *Community Relations* Binmas Polri yang diambil pada penelitian ini adalah program Binmas Noken. Program Binmas Noken ini adalah satuan tugas Polri yang namanya diambil dari salah satu warisan budaya bangsa atau masyarakat papua, dimana Noken berarti menjadi sebuah sumber inspirasi, menampung keluhan, menampung aspirasi, menampung segala macam saran pendapat dari rakyat yang ditunjukkan kepada kepala suku.

Sesuai dengan tujuan penelitian dan berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada tiga informan yang berhubungan dengan jalannya kegiatan *Community Relations* Binmas Polri, maka deskripsi pembahasan hasil penelitian dibagi menjadi tiga kelompok yakni bentuk dan upaya *Community Relations* Binmas Polri dalam pendekatan keamanan di Papua dalam membangun kepercayaan publik dan factor pendukung serta hambatan yang dihadapi Binmas Polri dalam program Binmas Noken.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kegiatan Binmas Noken. Faktor tersebut antara lain, (1) adanya keinginan

untuk menjalin kerjasama antara Binmas Polri dengan masyarakat di Papua untuk mendorong masyarakat dalam kesejahteraan (2) keinginan untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat di Papua, (3) keinginan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat Papua terhadap Polri dan meluruskan berita yang tidak benar.

Program ini dijalankan oleh Binmas Polri dan Binmas Polri yang berperan penting dalam terciptanya hubungan baik dengan komunitas masyarakat Papua. Program Binmas Noken ini menjadikan fungsi Binmas Polri dan Binmas Polri sama halnya dengan fungsi *Public Relations*.

Fungsi *Public Relations* menurut Rhenald Kesali (1994:5) dalam (Iriantara, 2019:8) menyatakan bahwa *Public Relations* sebagai fungsi strategi dalam manajemen yang melakukan komunikasi guna melahirkan pemahaman dan penerimaan publik.

Fungsi *public relations* diatas sangatlah penting dilakukan pada program Binmas Noken ini. Tujuan utama pelaksanaan program Binmas Noken ini untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Salah satu definisi *Public Relations* yang di ambil dari Oxley dalam (Iriantara, 2019:8) adalah :

1. Memberi saran kepada manajemen tentang semua perkembangan internal dan eksternal yang mungkin memengaruhi hubungan organisasi dengan publiknya.
2. Meneliti dan menafsirkan untuk kepentingan organisasi, sikap publik-publik utama pada saat ini, atauantisipasi sikap publik - publik pokok terhadap organisasi.
3. Bekerja sebagai penghubung (*liaison*) antara manajemen dan publiknya.
4. Memberi laporan berkala kepada manajemen tentang semua kegiatan yang memengaruhi hubungan publik dan organisasi.



Publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Papua khususnya wilayah Timika. Masyarakat Papua khususnya wilayah Timika memiliki pengaruh besar kepada keberlangsungan program Binmas Noken. Oleh karena itu Binmas Polri berusaha untuk menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat Papua khususnya wilayah Timika untuk memperoleh kepercayaan masyarakat Papua khususnya wilayah Timika dan memberikan *feedback* positif pada Binmas Polri.

Menurut Grunig (1978) dalam (Yosal Iriantara, 2019:10) publik adalah (1) dikategorikan berdasarkan kesamaan perilaku dan orang yang memiliki kesamaan perilaku tersebut sangat mungkin berkomunikasi dengan organisasi; serta (2) sebagai cara untuk memilih dan mengevaluasi media untuk program *Public Relations* tertentu.

Masyarakat Papua khusus wilayah Timika merupakan sekelompok orang yang menjalin hubungan istimewa dengan Binmas Polri. Mereka merupakan stakeholder yang sangat penting bagi keberlangsungan Binmas Polri dan perlu dijaga silaturahmiannya.

*Public Relations* memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, terutama jika organisasi tersebut sering berinteraksi dengan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan *Public Relations* merupakan salah satu *front liner* penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat. *Public Relations* menentukan kesan positif sebuah organisasi dimata masyarakat, dan hubungan dengan masyarakat akan menentukan cara organisasi bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Binmas Polri dalam menjalankan program Binmas Noken berusaha untuk membangun hubungan baik dan menjaga saling pengertian kepada masyarakat di Papua khususnya wilayah Timika. Komunikasi dilakukan pada program Binmas Noken

adalah komunikasi dua arah. Pengelolaan komunikasi yang dilakukan cukup bagus karena Polri mengetahui bagaimana program yang dijalankan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah Papua dengan adanya *Public Relations* Binmas Polri. Komunikasi yang baik akan memberikan kesan baik Binmas Polri di mata masyarakat.

*Public Relations* memiliki tujuan yang berlandaskan pada saling pengertian termasuk kepada tujuan-tujuan *Public Relations* menurut Oxley (1987:35) dalam (Iriantara, 2019:20)

1. Mendeteksi dan menangani isu serta peluang.
2. Goodwill karyawan atau anggota organisasi.
3. Mengayomi goodwill komunitas tempat organisasi menjadi bagian di dalamnya.
4. Mengatasi kesalahpahaman dan prasangka.
5. Mengarahkan perubahan.

Tujuan tersebut diaplikasikan menggunakan sebuah program dari *Community Relations* yang ditunjukkan kepada masyarakat di Papua khususnya wilayah Timika. Semua dalam program *Community Relations* dilakukan dengan didasarkan pada nilai-nilai dasar organisasi yakni menghormati individu, integritas yang utuh, kepercayaan, kredibilitas dan perbaikan berkelanjutan.

Menurut Gerber mengutip Arnoff & Baskin dalam (Yosal Iriantara, 2019:39) *Community Relations* adalah keterlibatan organisasi yang terencana, aktif, dan berkelanjutan di dalam sebuah komunitas untuk memelihara serta meningkatkan lingkungan yang memberikan manfaat bagi organisasi dan komunitas. Selain itu, Gerber juga mengutip Seitel yang mendefinisikan *community relations* sebagai secara positif menyampaikan pesan-pesan dan citra organisasi pada komunitas yang merupakan konsep yang lebih dari sekadar upaya membangun relasi. Lebih jauh lagi, Gerber, merujuk pendapat

Wilcox & Cameron dalam (Yosal Iriantara 2019:39), melihat *community relations* sebagai kegiatan terencana sebuah komunitas untuk memelihara sebuah lingkungan yang memberi kemaslahatan pada organisasi dan komunitas.

Dapat disimpulkan dari definisi *Community Relations* diatas bahwa program *Community Relations* Binmas Noken adalah keterlibatan Binmas Polri yang terencana, aktif, dan berkelanjutan didalam masyarakat Papua khususnya wilayah Timika serta meningkatkan lingkungan yang memberikan manfaat bagi Binmas Polri dan masyarakat Papua khususnya wilayah Timika. Selain itu, program *Community Relations* Binmas Noken adalah bentuk secara positif bagaimana menyampaikan pesan-pesan dan citra Polri pada masyarakat di Papua khusus wilayah Timika yang merupakan konsep yang lebih dari sekedar upaya membangun relasi. Lalu lebih jauh lagi, program *Community Relations* Binmas Noken adalah kegiatan terencana untuk masyarakat di Papua khususnya wilayah Timika guna untuk membangun kemaslahatan Bersama bagi masyarakat di Papua khususnya wilayah Timika dan Binmas Polri.

### **1. Pengembangan Relasi**

Mengembangkan dan membangun relasi adalah salah satu tujuan penting yang ingin dicapai oleh seorang *public relations officer* disamping melakukan komunikasi dengan publik organisasi. Masing-masing pihak baik yang sama kepentingannya maupun berbeda, melakukan komunikasi untuk mencapai tujuan tujuan bersama. *Public relations* memiliki tujuan yang cukup luas, namun pada dasarnya adalah membangun dan menjaga hubungan baik dengan publik yang mempunyai kepentingan dengan lembaga atau perusahaan. Hubungan baik tidak hanya ditujukan untuk mencari keuntungan organisasi namun untuk keuntungan dan kemaslahatan bersama kedua belah pihak.

Sebuah prinsip dan gagasan yang ingin dikembangkan melalui *community relations* adalah membangun komunikasi yang baik dengan orang disekitar perusahaan atau lembaga. Sebuah perusahaan akan selalu diperhatikan oleh orang-orang disekitar atau komunitas seperti milik mereka sendiri. Masyarakat sekitar tentu memiliki keinginan untuk turut andil dan berpartisipasi dalam menjaga dan melindungi lingkungannya. Doorley dan Garcia (dalam Yorsal Iriantara 2019: 24) memaparkan bahwa *community relations* merupakan sebuah pengembangan dan perencanaan strategis relasi dengan tujuan mendapatkan kebermanfaatannya bersama dengan masyarakat sekitar atau komunitas sasaran untuk membentuk reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

## **2. Mutual benefit**

*Community Relations* bukan hanya sekedar membangun hubungan baik antara perusahaan dengan komunitas sekitarnya, serta untuk meningkatkan kepedulian sosial dan saling pengertian, tapi juga harus diberikan perhatian dan informasi untuk dapat terbinanya hubungan yang baik. Dengan dibinanya hubungan dengan masyarakat sekitar, hal itu akan menunjang jalannya perusahaan sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen.

Bagaimanapun program-program komunitas seperti Binmas Noken dan organisasi sejalan dengan prinsip *Community Relations*, yaitu hubungan saling menguntungkan bagi perusahaan dan komunitasnya (*mutual benefit*). Tujuan adalah memberi informasi kepada komunitas tentang kebijaksanaan dan kegiatan perusahaan. Salah satu faktor agar *Community Relations* dapat tercipta dan terjalin dengan baik adalah dengan Menyusun strategi-strategi khusus yang sistematis dan terstruktur pada program kerja *Public Relations* seperti contohnya yang di ambil yaitu Binmas Noken Polri.

### **3. Komunitas sasaran**

Sebagai fungsi pelaksanaan hubungan masyarakat (humas), komunitas lokal seperti tokoh adat dan kepala suku dipandang suatu kesatuan dengan perusahaan yang memberi manfaat timbal balik. Prinsip kegiatan humas adalah mengharmonisasikan hubungan antara perusahaan beserta manajer dan karyawannya dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Hubungan yang harus dibina oleh humas tidak hanya hubungan jangka pendek, tetapi juga hubungan jangka panjang. Hubungan timbal balik dengan rasa memiliki dibutuhkan oleh perusahaan agar perusahaan memperoleh dukungan komunitas.

*Community relations* adalah upaya membina hubungan harmonis antara perusahaan atau organisasi dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial dan saling pengertian. Komunitas bukan lagi sekedar kumpulan orang yang tinggal pada lokasi yang sama tetapi juga menunjukkan terjadinya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Jadi, selain karena faktor-faktor fisik yakni tinggal di lokasi yang sama, komunitas itu juga bisa merupakan unit sosial yang terbentuk lantaran adanya interaksi di antara Polri di masyarakat di Papua. (Yosal, 2004:20-22).

### **4. Sasaran jangka Panjang**

Tentunya masyarakat secara perlahan-lahan akan menyadari keberadaan layanan yang ditawarkan bila organisasi membangun hubungan yang baik dengan mereka.

Hal ini menjadi sangat penting sekali untuk suatu organisasi kedepannya. Karena, suatu kelompok masyarakat bisa saja menceritakan organisasi kepada orang lain. Sehingga, nama organisasi pun akan menyebar luas seiring berjalannya waktu.

Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, binmas Noken menjalankan program dengan strategi dalam jangka waktu

yang panjang, *community relations* akan sangat penting untuk organisasi karena mereka bisa mendapatkan kepercayaan, dukungan dan kesetiaan dari masyarakat.

#### **5. Informasi yang disampaikan secara transparan antara Binmas Polri dengan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik.**

Setiap Komunitas tentunya harus bisa menyampaikan informasi secara transparan agar publik dapat percaya terhadap komunitasnya. Informasi yang disampaikan juga harus didapatkan dari sumber yang terpercaya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan didapati keterangan bahwa informasi yang ada sudah disampaikan secara apa adanya kepada masyarakat tanpa ada yang di tutup-tutupi, binmas noken pernah ke desa-desa, salah satunya yakni daerah terpencil dengan keadaan yang mungkin memprihatinkan, tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, masyarakatnya yang kurang adanya Pendidikan.

Ada juga yang tidak tau lagu Indonesia raya, segala macemnya, transparasi kita disitu kita tunjukkan bahwa polisi itu hadir untuk masyarakat disana memberikan wawasan kebangsaan dan memberikan bantuan seperti buku tulis, hal tersebut merupakan transparansi apa yang dilihat disana, kemudain disampaikan secara real di media.

Teori yang selaras dengan hasil wawancara ini adalah teori yang diungkapkan oleh DiPiazza & Eccles dalam (Dhea Rosdiana, 2015:38) menjelaskan bahwa *Publik trust* dapat tercipta dikarenakan adanya elemen-elemen kunci yang digunakan yakni,

##### 1) Semangat Transparansi (*Spirit of Transparency*)

*The first element is a spirit of transparency. Corporations have an obligation to provide willingly stakeholders the information needed to make decisions.*

*Stakeholders are demanding a much higher level of transparency. Recognizing that transparency is necessary to create and protect value)*

(Elemen yang pertama adalah semangat transparansi Suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara transparan terhadap stakeholders-nya. Transparansi diperlukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan citra)

2) Budaya Akuntabilitas (*Culture of Accountability*)

*The second element is a culture of accountability. Providing information is not enough. It must be accompanied by a firm commitment to accountability among direct participants in the Corporate Reporting Supply Chain and those who define how it should work. This accountability is collective: Every member of the Corporate Reporting Supply Chain must also commit to collaborating with all others.*

(Elemen yang kedua adalah budaya akuntabilitas Perusahaan tidak cukup untuk memberikan informasi secara transparan. Hal ini harus juga disertai dengan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas/tanggung jawab setiap partisipan yang menentukan bagaimana seharusnya mereka bekerja. Akuntabilitas ini bersifat kolektif. Setiap anggota perusahaan harus memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan anggota yang lainnya.)

3) Orang yang berintegritas (*People of Integrity*)

*But even transparency and accountability are not enough to establish Public trust. In the end, both depend on people of integrity. This can only come about when individuals of integrity are trying to "do the right thing,*

*not what is expedient or even necessarily what is permissible. What matters in the end are the actions of people, not simply their words. Without personal integrity as the foundation for reported information, there can be no Publik trust.*

(Tapi bahkan transparansi dan akuntabilitas tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik, kedua elemen ini bergantung kepada orang yang memiliki integritas. Kepercayaan publik akan terjadi ketika individu yang berintegritas berusaha melakukan “melakukan hal yang benar”. Yang terpenting adalah tindakan dari orang tersebut, tidak hanya perkataannya. Tanpa adanya orang yang berintegritas pada suatu perusahaan dalam menyampaikan informasi, maka kepercayaan publik tidak dapat diperoleh.)

Hal tersebut juga selaras dengan teori yang diungkapkan oleh Gerber mengutip Arnoff & Baskin dalam (Yosal Iriantara, 2019:39) *Community Relations* adalah keterlibatan organisasi yang terencana, aktif, dan berkelanjutan di dalam sebuah komunitas untuk memelihara serta meningkatkan lingkungan yang memberikan manfaat bagi organisasi dan komunitas. Selain itu, Gerber juga mengutip Seitel yang mendefinisikan *community relations* sebagai secara positif menyampaikan pesan-pesan dan citra organisasi pada komunitas yang merupakan konsep yang lebih dari sekadar upaya membangun relasi. Lebih jauh lagi, Gerber, merujuk pendapat Wilcox & Cameron dalam (Yosal Iriantara 2019:39), melihat *community relations* sebagai kegiatan terencana sebuah komunitas untuk memelihara sebuah lingkungan yang memberi kemaslahatan pada organisasi dan komunitas.



Dalam kaitan *community relations* dengan tanggung jawab sosial korporat, Gerber menunjukkannya dengan melihat Publik relations memberikan sumbangan pada pemenuhan keharusan organisasi menjalankan tanggung jawab sosialnya. Keterkaitan ini merupakan konsep penting saat satu organisasi mengkaji struktur organisasionalnya dan *community relations* sejalan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Karena itu, definisi *community relations* yang paling tepat dalam pandangan Gerber dalam (Yosal Iriantara 2019:39) adalah definisi yang dibuat Heath & Ni, yakni “implementasi strategis sasaran untuk membangun, memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki relasi di antara para *stakholder* serta *stakeseeker* yang kepentingannya dapat diselaraskan dengan kepentingan organisasi.

**6. Akuntabilitas Binmas Polri dengan masyarakat yang berkomitmen untuk bekerjasama dengan baik dalam membangun kepercayaan publik.**

Binmas Polri dalam menjalankan program-program yang dilaksanakan di Papua tidak hanya memerlukan informasi yang disampaikan secara transparan, akan tetapi harus memiliki komitmen atas tanggung jawab yang ada untuk setiap partisipannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dikatakan bahwa Binmas Polri memiliki tugas dan komitmen untuk menjalin kemitraan dengan baik itu dengan masyarakat, Lembaga, institusi, atau Lembaga Pendidikan dalam dan luar negeri bahkan, jadi menjalin kemitraan dan membuat MOU atau nota kesepakatan.

Teori yang selaras dengan hasil wawancara ini adalah teori yang diungkapkan oleh DiPiazza & Eccles dalam (Dhea Rosdiana, 2015:38) menjelaskan bahwa *Publik trust* dapat tercipta dikarenakan adanya elemen-elemen kunci yang digunakan yakni,

1) Semangat Transparansi (*Spirit of Transparency*)

*The first element is a spirit of transparency. Corporations have an obligation to provide willingly stakeholders the information needed to make decisions. Stakeholders are demanding a much higher level of transparency. Recognizing that transparency is necessary to create and protect value)*

(Elemen yang pertama adalah semangat transparansi Suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara transparan terhadap stakeholders-nya. Transparansi diperlukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan citra)

2) Budaya Akuntabilitas (*Culture of Accountability*)

*The second element is a culture of accountability. Providing information is not enough. It must be accompanied by a firm commitment to accountability among direct participants in the Corporate Reporting Supply Chain and those who define how it should work. This accountability is collective: Every member of the Corporate Reporting Supply Chain must also commit to collaborating with all others.*

(Elemen yang kedua adalah budaya akuntabilitas Perusahaan tidak cukup untuk memberikan informasi secara transparan. Hal ini harus juga disertai dengan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas/tanggung jawab setiap partisipan yang menentukan bagaimana seharusnya mereka bekerja. Akuntabilitas ini bersifat kolektif. Setiap anggota perusahaan harus memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan anggota yang lainnya.)

### 3) Orang yang berintegritas (*People of Integrity*)

*But even transparency and accountability are not enough to establish Publik trust. In the end, both depend on people of integrity. This can only come about when individuals of integrity are trying to "do the right thing, not what is expedient or even necessarily what is permissible. What matters in the end are the actions of people, not simply their words. Without personal integrity as the foundation for reported information, there can be no Publik trust.*

(Tapi bahkan transparansi dan akuntabilitas tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik, kedua elemen ini bergantung kepada orang yang memiliki integritas. Kepercayaan publik akan terjadi ketika individu yang berintegritas berusaha melakukan “melakukan hal yang benar”. Yang terpenting adalah tindakan dari orang tersebut, tidak hanya perkataannya. Tanpa adanya orang yang berintegritas pada suatu perusahaan dalam menyampaikan informasi, maka kepercayaan publik tidak dapat diperoleh.)

## **7. Integritas Binmas Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam membangun kepercayaan Publik.**

Seperti yang kita ketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik, keduanya bergantung kepada orang yang memiliki integritas. Kepercayaan publik akan terjadi ketika individu yang berintegritas berusaha melakukan ‘melakukan hal yang benar’. Yang terpenting adalah tindakan dari orang tersebut, tidak hanya perkataannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan, Binmas Polri telah menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya masing-masing untuk membangun kepercayaan publik dalam pendekatan di Papua.

Teori yang selaras dengan hasil wawancara ini adalah teori yang diungkapkan oleh DiPiazza & Eccles dalam (Dhea Rosdiana, 2015:38) menjelaskan bahwa *Publik trust* dapat tercipta dikarenakan adanya elemen-elemen kunci yang digunakan yakni,

1) Semangat Transparansi (*Spirit of Transparency*)

*The first element is a spirit of transparency. Corporations have an obligation to provide willingly stakeholders the information needed to make decisions. Stakeholders are demanding a much higher level of transparency. Recognizing that transparency is necessary to create and protect value)*

(Elemen yang pertama adalah semangat transparansi Suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara transparan terhadap stakeholders-nya. Transparansi diperlukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan citra)

2) Budaya Akuntabilitas (*Culture of Accountability*)

*The second element is a culture of accountability. Providing information is not enough. It must be accompanied by a firm commitment to accountability. among direct participants in the Corporate Reporting Supply Chain and those who define how it should work. This accountability is collective: Every member of the Corporate Reporting Supply Chain must also commit to collaborating with all others.*

(Elemen yang kedua adalah budaya akuntabilitas Perusahaan tidak cukup untuk memberikan informasi secara transparan. Hal ini harus juga disertai dengan

komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas/tanggung jawab setiap partisipan yang menentukan bagaimana seharusnya mereka bekerja. Akuntabilitas ini bersifat kolektif. Setiap anggota perusahaan harus memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan anggota yang lainnya.)

3) Orang yang berintegritas (*People of Integrity*)

*But even transparency and accountability are not enough to establish Publik trust. In the end, both depend on people of integrity. This can only come about when individuals of integrity are trying to "do the right thing, not what is expedient or even necessarily what is permissible. What matters in the end are the actions of people, not simply their words. Without personal integrity as the foundation for reported information, there can be no Publik trust.*

(Tapi bahkan transparansi dan akuntabilitas tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik, kedua elemen ini bergantung kepada orang yang memiliki integritas. Kepercayaan publik akan terjadi ketika individu yang berintegritas berusaha melakukan “melakukan hal yang benar”. Yang terpenting adalah tindakan dari orang tersebut, tidak hanya perkataannya. Tanpa adanya orang yang berintegritas pada suatu perusahaan dalam menyampaikan informasi, maka kepercayaan publik tidak dapat diperoleh.)

**8. Faktor yang menghambat jalannya program Binmas Noken adalah**

Berdasarkan hasil penelitian, program Binmas Noken berjalan dengan lancar. Tidak ada signifikansi faktor penghambat jalannya

program Binmas Noken ini. Masyarakat di Papua khususnya wilayah Timika terlihat antusias dan senang jika kekurangannya bisa dipenuhi. Faktor penghambat pada program Binmas Noken ini terletak pada hal-hal yang sifatnya teknis. Faktor penghambat Binmas Noken secara teknis yakni, (1) Kondisi demografis dan medan yang dilalui tim. Wilayah di Papua yakni daerah operasi merupakan pegunungan dengan transportasi darat dan udara yang beresiko tinggi. Masyarakat di Papua pun tinggal dalam kelompok-kelompok kecil yang hanya terdiri atas dua atau tiga kepala keluarga dalam satu kelompok. Sementara jarak antarkelompok cukup jauh.

Jadi, pihak Binmas Polri haruslah berangkat lebih awal agar sampai di tempat tujuan sampai dengan tepat waktu. (2) Perbedaan pola pikir masyarakat Papua. Pola pikir masyarakat Papua yang cenderung menunggu pemberian karena terbuai dengan program bantuan tunai menjadi salah satu kendala awal program Binmas Noken, misalnya saat menjelaskan bagaimana budi daya ternak babi, diberikan informasi bahwa konsentrat diberikan pada saat pagi hari dan sore hari, namun saat terakhir masyarakat Papua bertanya mendapatkan uang dengan jumlah berapa. Di satu sisi, program Binmas Noken ini ingin agar masyarakat Papua maju dengan memberikan pengetahuan yang dimiliki, seperti teknik berternak dan berkebun, tetapi di sisi lain masyarakat di Papua enggan.

Dengan demikian Binmas Polri tetap semangat dan pantang mundur untuk memberikan pengertian secara mendasar bagi masyarakat di Papua guna membangun kepercayaan publik dalam pendekatan keamanan di Papua, khususnya wilayah Timika.

## **9. Faktor faktor pendukung dan faktor penghambat jalannya program Binmas Noken**

Setelah dilakukannya wawancara dengan beberapa orang, maka Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut komunikator, komunikan, dan pesan, sebagai berikut:

- a. Komunikator memiliki kredibilitas/kewibawaan yang tinggi, daya tarik fisik maupun nonfisik yang mengundang simpati, cerdas dalam menganalisis suatu kondisi, memiliki integritas/keterpaduan antara ucapan dan tindakan, dapat dipercaya, mampu memahami situasi lingkungan kerja, mampu mengendalikan emosi, memahami kondisi psikologis komunikan, bersikap supel, ramah, dan tegas, serta mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat dimana ia berbicara.
- b. Komunikan memiliki pengalaman yang luas, memiliki kecerdasan menerima dan mencerna pesan, bersikap ramah, supel dan pandai bergaul, memahami dengan siapa ia berbicara, bersikap bersahabat dengan komunikator.
- c. Pesan komunikasi dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, disampaikan secara jelas sesuai kondisi dan situasi, lambang-lambang yang digunakan dapat dipahami oleh komunikator dan komunikan, dan tidak menimbulkan multi interpretasi/penafsiran yang berlainan.

Selain faktor pendukung, maka ada juga faktor penghambat dalam menjalankan program Binmas Noken yang pertama adalah masalah sinergitas antara pemerintah daerah dan stakeholder karena belum sepenuhnya mendukung program Binmas Noken Polri. Namun, Polri tidak ingin bekerja atau dianggap sebagai pahlawan sendiri sehingga diperlukan komunikasi, koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait untuk sama-sama memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua melalui pelatihan-pelatihan. Karena, menurut Kapolri Jenderal Tito bahwa problem utama di Papua adalah masalah kesejahteraan dan kesejahteraan itu tidak tersentuh oleh program-program pemerintah. Nah, program pemerintah ini

harapannya Polri bersama-sama stakeholder bersinergi membangun peradaban dalam konteks kesejahteraan.

## **10. Kepercayaan publik terhadap Polri di Papua**

Kepercayaan masyarakat adalah kepercayaan warga terhadap suatu institusi negara dan pemerintah, kebijakan publik, dan para pejabatnya (Dwiyanto, 2011). Menurut Bovens & Wille (2008) kepercayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh variabel yang ada di bawah kontrol institusi pemerintah, seperti kinerja, melainkan juga ditentukan oleh variabel yang di luar kendali institusi pemerintah, seperti kondisi ekonomi, perubahan antargenerasi, dan situasi dalam masyarakat. Menurut Wu et al., (2012) kepercayaan kepada polisi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sosial demografi, sudut pandang ini berpendapat bahwa kepercayaan seseorang terhadap polisi dipengaruhi oleh posisi demografi mereka di masyarakat. Sudut pandang kedua adalah kinerja institusi, kinerja suatu institusi berkaitan erat dengan kepuasan masyarakat terhadap institusi tersebut. Sudut pandang ketiga adalah budaya, nilai budaya dan norma merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku dan opini masyarakat terhadap institusi terkait.

Dampak Viralnya Kasus Pembunuhan yang menyeret salah satu Petinggi Polri, membuat kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Kepolisian menurun. Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam wawancaranya di [compass.com](https://www.compass.com), menyebut bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri tengah menurun. Ini salah satunya disebabkan oleh kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo.



Temuan ini merupakan dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian semakin menurun. Kepercayaan publik menurun terutama setelah kasus pembunuhan Brigadir J atau Yosua yang dilakukan mantan Kadiv Protram Ferdy Sambo cs. sebelumnya tingkat kepercayaan publik kepada Polisi Republik Indonesia (Polri) pernah mencapai 87,8% pada 2018. Namun, setelah Pilpres 2019 kepercayaan terhadap polisi menurun pada angka 72,1% dan kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan pada polisi kembali menurun ke angka 59,1%.

Survei ini dilakukan pada 11-20 September 2022 kepada 1.200 responden di 34 provinsi dan menggunakan metode riset kualitatif dengan analisis media, Focus Group Discussion (FGD), dan indepth interview. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (face to face interview) dengan margin of error (Moe) survei ini sekitar 2,9%.

Dengan adanya program Binmas Noken yang selalu hadir ditengah masyarakat Papua khususnya di Timika, kinerja yang di berikan oleh polri dapat membantu masyarakat dapat mengembalikan kepercayaannya kepada polri.